

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN WISATA KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RIZKY AFRIANI

NPP. 32.0671

Asdaf Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: khykyafrrizky121@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (Gap): *There is a gap between the significant potential of traditional village tourism in Central Sumba Regency and its suboptimal management. This is reflected in the number of tourist visits, which remains far below the targets set in the Regional (Mumtia, 2020) government management contributes to the development of traditional village tourism in Central Sumba Regency.* **Method:** *The research uses a descriptive qualitative method, employing Terry's management theory. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation, with data analysis carried out through data reduction, information presentation, and conclusion drawing. Informants in this study consist of the Regional Secretary of Central Sumba, Head of Bappeda, Head of the Tourism and Culture Office, Head of Tourism and Creative Economy Development Division, Head of Partnership Division, Head of Cultural Affairs Division, traditional village managers, community members, and tourists.* **Result:** *The research findings show that tourism management has been directed toward sustainable development and cultural preservation. However, it still faces challenges such as limited human resources, budget constraints, inadequate infrastructure, and lack of digital promotion. The government has undertaken training programs, promotional activities, and infrastructure development, and has collaborated with local communities and other sectors to address these challenges.* **Conclusion:** *Government management in the development of traditional village tourism is fairly effective but requires further strengthening in implementation and supervision through improved human resources, increased funding, and enhanced community participation.* **Keywords:** *Government Management, Tourism Development, Traditional Villages, Central Sumba.*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP) Adanya kesenjangan antara potensi besar wisata kampung adat di Kabupaten Sumba Tengah dengan pengelolannya yang belum optimal. Hal ini tercermin dari capaian kunjungan wisatawan yang masih jauh dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pemerintahan dalam pengelolaan wisata kampung adat di Kabupaten Sumba Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori manajemen oleh Terry. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan. Adapun informan dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu melibatkan Sekertaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabid Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabid Kemitraan, Kabid Kebudayaan, Pengelola Kampung Adat, Masyarakat dan Wisatawan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan telah diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dan pelestarian budaya, namun masih terkendala oleh terbatasnya SDM, anggaran, infrastruktur, dan promosi digital. Pemerintah telah melakukan pelatihan, promosi, dan pembangunan fasilitas, serta menggandeng masyarakat dan sektor lain untuk mengatasi hambatan tersebut. **Kesimpulan:** Manajemen pemerintahan dalam pengelolaan wisata kampung adat berjalan cukup baik, namun masih perlu penguatan dalam pelaksanaan dan pengawasan melalui

peningkatan kualitas SDM, anggaran, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen Pemerintahan, Pengelolaan Wisata, Kampung Adat, Sumba Tengah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki pesona dalam industri pariwisata. Potensi daya tarik pariwisata Indonesia didukung oleh wilayah kepulauan yang menawan dan keanekaragaman. Sektor pariwisata yang dimiliki Indonesia harus digali lebih mendalam untuk dapat dikembangkan dan dikelola secara optimal. Pengelolaan pariwisata tidak hanya fokus pada potensi objek wisata itu sendiri, tetapi juga perlu memperhatikan kelestarian lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pariwisata, penting untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. (Kusuma, 2024)

Sumba Tengah merupakan salah satu kabupaten yang ada di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Meskipun secara popularitas masih kalah dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Sumba, seperti Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur, Sumba Tengah tetap menyimpan kekayaan alam dan budaya yang unik dan autentik. Hal ini juga dipengaruhi dengan karakteristik serta kondisi geografis wilayah Sumba Tengah. Kabupaten Sumba Tengah memiliki banyak objek wisata yang dapat dikunjungi dan memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Berikut jumlah objek wisata di Kabupaten Sumba Tengah:

Tabel 1.1
Objek dan daya tarik wisatawan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024

No (1)	Kecamatan (2)	Objek Wisata (3)
1	Katikutana	1. Kampung Adat Pasunga 2. Kampung Adat Kabonduk 3. Kampung Adat Laitarung 4. Kampung Adat Galubakul 5. Kampung Adat Praimarada 6. Kampung Adat Anakalang 7. Makam Umbu Tipuk Maisi
2	Mamboro	1. Pantai Karendi 2. Pantai Mananga 3. Pantai Pasir Batu 4. Pantai Tarapa 5. Pantai Kapulit 6. Air Terjun Praikalala 7. Kampung Adat Wawarongu 8. Kampung Adat Manuakalada 9. Danau Kalita Wawi 10. Cendana Hils 11. Tebing Batu Paledu Anakara
3	Umbu Ratu Nggay	1. Air Terjun Waikapori 2. Hutan Pinus Tanadaru 3. Gua Liangu Marapu 4. Pantai Pahar 5. Pantai Lenang Wende
4	Umbu Ratu Nggay Barat	1. Air Terjun Harangi 2. Embung Lokujangi 3. Kampung Adat Deri Kambejawa 4. Goa Palijuni Toda
5	Umbu Ratu Nggay Tengah	1. Air Terjun Bola
Jumlah		26 Objek Wisata

Sumber: LAKIP Disparbud Kabupaten Sumba Tengah 2024

Berdasarkan data dari LAKIP Disparbud Kabupaten Sumba Tengah (2024), tercatat sebanyak 26 objek wisata yang tersebar di beberapa kecamatan, dengan objek wisata budaya berupa kampung adat sebagai yang terbanyak. Jika dikelola dan dikembangkan dengan baik,

potensi ini dapat memberikan keuntungan besar bagi pemerintah daerah. Pariwisata kampung adat memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi lokal dan pelestari budaya, termasuk di Kabupaten Sumba Tengah yang dikenal dengan warisan budaya khususnya. Namun, pengelolaan wisata kampung adat di daerah ini masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya capaian kunjungan wisatawan yang masih berada jauh di bawah target dan hanya mencapai 32% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2023. Padahal, pengembangan wisata desa secara strategis terbukti mampu memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya (Widiastini, Suryani, & Puspita, 2025).

Hambatan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan media digital untuk promosi, kurangnya infrastruktur penunjang, serta lemahnya kolaborasi lintas sektor. Tresiana dan Kartika (2024) menegaskan bahwa kegagalan dalam mengembangkan desa wisata tradisional sering kali bersumber dari kebijakan yang tidak adaptif terhadap konteks lokal serta rendahnya komitmen masyarakat.

Dalam konteks tersebut, manajemen pemerintahan menjadi elemen kunci yang perlu dikaji secara mendalam, karena pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menginisiasi, mengarahkan, serta mengoordinasikan pengelolaan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif seperti model Pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan media telah terbukti efektif dalam pengembangan desa wisata yang tangguh (Noviana, Nurkholis, & Huda, 2025). Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang partisipatif menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang responsif terhadap tantangan global dan lokal (Basyar, Arifin, & Mulyadi, 2025). Upaya untuk mengembangkan potensi wisata juga perlu memperhatikan aspek ekologi dan keberlanjutan, yang menekankan perlunya pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dengan kesejahteraan masyarakat lokal (Sholeha & Sumarmi, 2025).

Dengan memperkuat kapasitas manajemen pemerintahan lokal, melibatkan masyarakat secara aktif, dan menerapkan promosi digital yang efektif, pengembangan wisata kampung adat dapat diarahkan pada pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana manajemen pemerintahan berperan dalam pengelolaan wisata kampung adat di Sumba Tengah, sekaligus mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam rangka mendorong pembangunan pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pengembangan pariwisata kampung adat memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus melestarikan warisan budaya, khususnya di Kabupaten Sumba Tengah yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal. Namun, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara besarnya potensi yang dimiliki dengan efektivitas pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kesenjangan ini tercermin dari rendahnya realisasi kunjungan wisatawan yang pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar 32% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, tantangan utama yang dihadapi meliputi minimnya infrastruktur, akses jalan yang sulit dilalui terutama ke kawasan kampung adat seperti Deri Kambajawa, keterbatasan fasilitas amenities seperti penginapan dan pusat informasi, serta rendahnya pemanfaatan media digital untuk promosi wisata. Ketersediaan fasilitas pariwisata yang terbatas. Potensi budaya yang besar seperti yang dimiliki Kampung Adat Pasunga dan Deri Kambajawa belum dimanfaatkan secara optimal sebagai aset strategis pariwisata budaya. Meski pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya seperti pelatihan, festival budaya, serta pembangunan fasilitas dasar, namun langkah-langkah tersebut masih bersifat sektoral dan belum didukung oleh sistem manajemen pemerintahan yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana fungsi-fungsi manajemen pemerintahan khususnya, berdasarkan pendekatan POAC (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan) menurut Terry yang diimplementasikan dalam pengelolaan wisata kampung adat di Kabupaten Sumba Tengah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Adhisti. D, (2024) yang berjudul Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Desa Wisata Ranupani Di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan Desa Wisata Ranupani adalah dengan memaksimalkan potensi desa wisata menggunakan peluang yang ada. Hambatan dalam pengelolaan Desa Wisata Ranupani ini yaitu belum kondusifnya lokasi sekitar Desa Ranupani, Masih kurangnya kesadaran masyarakat setempat, kurangnya kebijakan

pemerintah. Upaya dalam mengatasi hambatan yang ada seperti: *green and smart tourism*, *brand Lumajang* eksotik, pemasaran digital, dan pemanfaatan *Shuttle bus*. Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik analisis data kualitatif berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan teori SWOT oleh Rangkuti, kemudian pada lokus penelitian terdahulu yang berada di Kabupaten Lumajang provinsi Jawa Timur

Penelitian kedua dilakukan oleh (Djaga, 2023) yang berjudul Strategi Pengembangan Objek Wisata Kampung Adat Prai Ijing Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk strategi pengembangan Kampung Adat Prai Ijing diperoleh strategi yang tepat dilakukan adalah memanfaatkan kekuatan dan peluang agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Kampung Adat Prai Ijing. Strategi yang dilakukan yaitu mengembangkan potensi SDM lokal yang mendukung pengembangan objek wisata, mengembangkan potensi wisata yang di miliki secara maksimal, seperti meningkatkan promosi, membangun rumah makan, meningkatkan dan merawat fasilitas serta sarana dan prasarana yang sudah tersedia. Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan karena menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dimana pada penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman dan Analisis SWOT, serta lokus penelitian berada di Kabupaten Sumba Barat

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Mumtia, 2020) yang berjudul Konsep Manajemen Pariwisata Dalam Meningkatkan Pengunjung Di Pantai Pasir Putih Lamreh. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola Pantai Pasir Lamreh tidak melakukan promosi dan publikasi sebagaimana semestinya, yaitu mereka hanya mengandalkan media sosial pengunjung yang berfoto ria di objek wisata. Selain itu juga masih ada pelayanan tidak langsung seperti kebersihan, keamanan wahana, kelayakan fasilitas dan gangguan eksternal seperti ternak yang berkeliaran masih belum teratasi. Namun demikian, penanggung jawab lokasi, pengelola dan pekerja tetap mencoba meningkatkan kualitas pariwisata dengan menawarkan konsep manajemen pariwisata yang semakin baik. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dari segi metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan teori yang digunakan yaitu teori manajemen oleh Terry. Selain itu juga penelitian ini memiliki persamaan dalam segi pembahasan yaitu membahas terkait pengelolaan wisata. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada fokus utama dan tujuannya, serta lokus penelitian ini di Provinsi Aceh.

Penelitian ke empat dilakukan oleh (Hasanah, 2017) yang berjudul Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis Masyarakat (Kasus Objek Wisata Alam Rammang-Rammang Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan). Penelitian ini menunjukkan bahwa wisata alam Rammang-Rammang dikelola langsung oleh masyarakat. Masyarakat Rammang-Rammang menolak kegiatan penambangan di kawasan karst Desa Salenrang untuk menyelamatkan lingkungan dan potensi alam yang masih terjaga. Hambatan utama yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat serta kendala anggaran dalam pengembangan wisata alam Rammang-Rammang, strategi pengelolaan wisata alam Rammang-Rammang berbasis masyarakat yang dipelopori oleh kelompok sadar wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk memperbaiki sumber daya manusia dan juga memperbaiki kehidupan mereka. Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dari segi pembahasan yaitu membahas terkait pengelolaan wisata. Selanjutnya Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yang digunakan, dimana metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan penelitian Muziatul Hasanah menggunakan metode gabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif.

Penelitian ke lima yang dilakukan oleh (Azim, 2020) dengan judul Analisis Pengelolaan Objek Wisata Danau Bandar Khayangan oleh Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru (Studi pada seksi sarana dan prasarana). Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pengelolaan objek wisata Danau Bandar Khayangan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru berada pada interval penilaian kurang efektif. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan pengelolaan yang kurang maksimal dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang terawat bahkan tidak dapat digunakan lagi. Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dari segi pembahasan yaitu membahas terkait pengelolaan pariwisata dan teori yang digunakan adalah teori manajemen oleh Terry. Akan tetapi, penelitian Abdul Azim berfokus pada analisis pengelolaan objek wisata Danau Bandar Khayangan sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada

manajemen pengelolaan wisata Kampung Adat. Selanjutnya Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada metode penelitian yang digunakan, dimana metode ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan Survey deskriptif. Penelitian ini bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari berbagai penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan dan pengembangan pariwisata di daerah. Fokus utama penelitian ini adalah pada *manajemen pemerintahan* dalam pengelolaan wisata kampung adat di Kabupaten Sumba Tengah, dengan menitikberatkan pada fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Hal ini berbeda dari penelitian Adhisti (2024) yang meneliti strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam mengelola Desa Wisata Ranupani melalui analisis SWOT tanpa mengkaji secara mendalam fungsi manajerial pemerintahan. Penelitian ini juga berbeda dari penelitian Djaga (2023) yang berfokus pada strategi pengembangan Kampung Adat Prai Ijing di Kabupaten Sumba Barat dengan pendekatan SWOT dan analisis Miles dan Huberman, yang lebih menyoroti pengembangan potensi wisata dan SDM lokal, tanpa membahas aspek pengelolaan dari sisi pemerintah daerah secara sistematis.

Selain itu, meskipun penelitian Mumtia (2020) dan Azim (2020) sama-sama menggunakan teori manajemen oleh Terry, fokus mereka terbatas pada pengelolaan fasilitas dan promosi wisata (seperti di Pantai Pasir Putih Lamreh dan Danau Bandar Khayangan), tanpa menelaah keterlibatan pemerintahan daerah dalam pengelolaan wisata berbasis adat secara menyeluruh. Penelitian ini juga berbeda dari penelitian Hasanah (2017) yang mengkaji pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat di Rammang-Rammang, yang menonjolkan peran komunitas dan kelompok sadar wisata, serta menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif secara murni.

Dengan begitu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap peran dan fungsi manajemen pemerintahan daerah dalam mengelola wisata kampung adat, dengan memperhatikan konteks sosial budaya lokal Kabupaten Sumba Tengah. Penelitian ini juga menawarkan perspektif yang lebih holistik karena tidak hanya melihat pengelolaan dari sisi strategi atau promosi semata, tetapi menempatkan pemerintah sebagai aktor sentral dalam tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis budaya. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan kajian pengelolaan pariwisata berbasis lokal, khususnya dalam konteks peran aktif pemerintah daerah di wilayah yang memiliki kekayaan adat dan budaya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana manajemen pemerintahan dilaksanakan dalam pengelolaan wisata kampung adat di Kabupaten Sumba Tengah. Secara khusus, penelitian ini ingin menjelaskan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola destinasi wisata berbasis budaya lokal. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan guna mewujudkan pengelolaan wisata kampung adat yang efektif, berkelanjutan, dan partisipatif.

II. METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan desain penulisan kualitatif. Menurut Simangunsong (2017), menjelaskan bahwa “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan filsafat postpositivisme sebagai landasan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, instrument utamanya adalah peneliti, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna”. Menurut Simangunsong (2017) menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki fokus pada pencarian makna (meanings) sehingga perlu disadari bahwa makna yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif berasal dari perumusan masalah yang dikembangkan menjadi berbagai tema penelitian yang bersifat subjektif dan beragam”. Penulis memilih metode kualitatif ini bertujuan memberikan gambaran kondisi sesungguhnya di lapangan berdasarkan data yang telah

dikumpulkan dan dianalisis serta merumuskan masalah yang telah ditemui.

Penulis mengumpulkan data melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilaksanakan selama 21 hari di Kabupaten Sumba Tengah, khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Tengah. Wawancara dilakukan terhadap 10 informan yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Tengah, Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Tengah, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kepala Bidang Kemitraan, Kepala Bidang Kebudayaan, Pengelola Objek Wisata, Wisatawan, Masyarakat. Berikutnya observasi yang dilakukan diman penulis ikut serta dan terlibat dalam kegiatan secara fleksibel sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan serta didukung dengan pengumpulan data melalui dokumentasi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjang fakta di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Manajemen Pemerintahan dalam Pengelolaan Wisata Kampung Adat di Kabupaten Sumba Tengah

Manajemen pemerintahan dalam pengelolaan wisata kampung adat di Kabupaten Sumba Tengah dilakukan melalui empat fungsi utama manajemen menurut George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada aspek perencanaan (*planning*), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menyusun program kerja yang diarahkan pada pelestarian budaya lokal, pembangunan destinasi wisata berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kepariwisataan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan seperti penyusunan agenda tahunan pelatihan budaya, promosi pariwisata, serta pembangunan fasilitas umum. Meskipun demikian, hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata mengungkapkan bahwa belum terdapat dokumen perencanaan jangka panjang khusus yang terfokus pada pengelolaan wisata kampung adat. Perencanaan masih bersifat umum dalam lingkup pengembangan pariwisata kabupaten. Kepala Dinas juga menyampaikan bahwa “keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pengelolaan wisata kampung adat secara berkelanjutan”. Selain itu, meskipun kegiatan musrenbang dilakukan, aspirasi masyarakat seringkali belum terserap secara optimal dalam kebijakan program dinas.

Dari sisi pengorganisasian (*organizing*), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Tengah telah memiliki struktur organisasi yang cukup lengkap dengan pembagian tugas pada tiap bidang. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa beberapa posisi jabatan teknis belum terisi secara optimal sehingga menghambat efektivitas kerja. Misalnya, pada seksi pengembangan destinasi wisata, belum tersedia tenaga teknis ahli yang fokus menangani kampung adat. Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa peran Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) belum diberdayakan secara maksimal, dan pada beberapa kampung bahkan belum terbentuk secara resmi. Dalam wawancara dengan staf Dinas, dijelaskan bahwa “koordinasi antarbidang dalam dinas masih bersifat sektoral dan belum lintas bidang untuk pengelolaan satu kawasan kampung adat secara holistik.” Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan seperti pelatihan, promosi, dan monitoring dilakukan secara terpisah dan tidak terintegrasi dalam satu siklus manajemen.

Pada aspek pelaksanaan (*actuating*), pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan kepada masyarakat terkait budaya lokal dan keterampilan promosi wisata, pembangunan pos jaga, serta penyelenggaraan Festival Seni Budaya yang bertujuan untuk menarik wisatawan ke kampung adat. Hasil wawancara dengan masyarakat Kampung Derikambajawa mengungkapkan bahwa mereka merasa dilibatkan dalam kegiatan pelatihan, namun jumlah peserta masih terbatas dan belum mencakup seluruh warga. “Kami pernah dilatih tentang menerima tamu wisatawan dan menjaga kebersihan lingkungan, tapi baru satu kali,” ujar salah satu tokoh adat di Derikambajawa. Selain itu, dalam pelaksanaan promosi wisata, pemerintah masih menghadapi keterbatasan karena kurangnya SDM yang menguasai media digital. Hal ini terlihat dari masih minimnya konten promosi kampung adat di media sosial resmi Dinas, padahal kampung adat merupakan daya tarik utama wisata budaya di Sumba Tengah. Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, hanya dua kampung adat yang secara aktif dipromosikan, yaitu Kampung Pasunga dan Derikambajawa, sementara kampung-kampung lainnya belum tersentuh program dinas secara intensif.

Sementara itu, fungsi pengawasan (*controlling*) dalam pengelolaan wisata kampung adat di Kabupaten Sumba Tengah masih bersifat konvensional dan belum berbasis sistem evaluasi kinerja. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi menyampaikan bahwa “monitoring hanya dilakukan dalam bentuk kunjungan lapangan dan dialog dengan masyarakat, belum ada indikator evaluasi berbasis data atau laporan rutin.” Dalam wawancara dengan masyarakat, mereka menyampaikan bahwa tidak ada forum evaluasi bersama antara dinas dan masyarakat terkait pengelolaan wisata. Padahal, masyarakat merasa perlu memberikan masukan atas kekurangan dan tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal infrastruktur dan pembagian hasil manfaat wisata. Ketidakhadiran SOP atau indikator keberhasilan membuat pelaksanaan program tidak terukur secara objektif, sehingga sulit untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar efektif atau tidak dalam mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Manajemen Pemerintahan dalam Pengelolaan Wisata Kampung Adat

Faktor pendukung utama dalam pengelolaan wisata kampung adat di Kabupaten Sumba Tengah antara lain adalah tingginya komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran yang meskipun terbatas, tetap disediakan setiap tahun untuk kegiatan kebudayaan dan promosi wisata. Selain itu, masyarakat adat masih memegang teguh nilai-nilai budaya Marapu yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Dukungan dari generasi muda juga mulai tumbuh, terlihat dari beberapa pemuda yang mulai aktif mempromosikan kampung adat melalui media sosial secara mandiri. Kepala Dinas Pariwisata menyatakan bahwa “semangat masyarakat dalam menjaga nilai adat dan menyambut wisatawan menjadi modal sosial utama yang tidak dimiliki semua daerah.”

Namun terdapat berbagai faktor penghambat yang sangat memengaruhi efektivitas pengelolaan wisata kampung adat. Keterbatasan infrastruktur merupakan hambatan terbesar, terutama akses jalan menuju lokasi kampung adat yang masih rusak dan berlumpur saat musim hujan, seperti yang terjadi di Kampung Derikambajawa. Selain itu, fasilitas penunjang seperti penginapan, toilet umum, pusat informasi wisata, serta ketersediaan air bersih masih sangat terbatas. Data dari Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa hingga 2023, hanya terdapat 4 penginapan dan 1 pramuwisata di seluruh Kabupaten Sumba Tengah. Hasil observasi di lapangan juga menunjukkan minimnya fasilitas transportasi dan perjalanan wisata, yang membuat wisatawan kesulitan menjangkau lokasi kampung adat. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah rendahnya kapasitas SDM di Dinas Pariwisata dalam bidang teknologi informasi. Dalam wawancara, staf dinas mengungkapkan bahwa “kami belum memiliki tenaga khusus untuk membuat konten promosi digital, sehingga akun media sosial dinas belum bisa dimaksimalkan.”

3.3 Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Manajemen Pemerintahan dalam Pengelolaan Wisata Kampung Adat di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan berbagai upaya, baik langsung maupun tidak langsung. Upaya langsung yang dilakukan antara lain adalah perbaikan jalan akses menuju kampung adat, pembangunan pos jaga, dan pengadaan fasilitas publik seperti tempat parkir dan tempat cuci tangan di area wisata. Selain itu, dinas juga melaksanakan pelatihan kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan pengelolaan wisata, pelatihan seni budaya, dan manajemen homestay sederhana. Kepala Dinas menjelaskan bahwa “kami sedang mengajukan kerja sama lintas OPD untuk perbaikan akses jalan dan membentuk Pokdarwis baru di kampung yang belum punya organisasi pengelola wisata.” Pembentukan kelompok kerja masyarakat bertujuan untuk menciptakan aktor lokal yang mampu mandiri dalam mengelola wisata kampung adat.

Sementara itu, upaya tidak langsung dilakukan dengan membangun kerja sama dengan sektor swasta, LSM, dan komunitas budaya seperti penggiat pariwisata dan akademisi. Pemerintah juga mulai mendorong pemanfaatan media sosial oleh pemuda desa untuk membuat konten promosi mandiri yang menampilkan kearifan lokal. Sebagai strategi jangka panjang, pemerintah menyusun dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang akan menjadi pedoman dalam pengelolaan destinasi wisata secara terpadu. Dinas Pariwisata juga menginisiasi penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai langkah awal mengintegrasikan budaya lokal ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Semua upaya

ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat banyak tantangan, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah terus berproses dalam memperkuat manajemen pengelolaan wisata kampung adat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, temuan utama menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan dalam pengelolaan wisata kampung adat di Kabupaten Sumba Tengah telah Pada tahap perencanaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang dalam pengembangan wisata kampung adat, yang diarahkan pada pelestarian budaya lokal, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Namun, rencana tersebut masih terbatas oleh minimnya data terpadu serta belum optimalnya perencanaan berbasis potensi lokal. Pada aspek pengorganisasian, struktur organisasi telah terbentuk, tetapi belum didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kapasitas. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga belum berjalan maksimal. Dalam aspek pelaksanaan, berbagai program seperti pelatihan masyarakat, promosi wisata, pembangunan fasilitas, dan pelestarian budaya telah dilakukan. Namun, keterlibatan masyarakat belum merata, dan masih terkendala oleh minimnya pemanfaatan teknologi digital. Sedangkan pada aspek pengawasan, monitoring dan evaluasi rutin telah dilaksanakan, tetapi masih bersifat administratif dan belum menyentuh substansi kualitas pelayanan wisata serta kepuasan pengunjung.

Secara umum, hasil temuan penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu, meskipun terdapat perbedaan pada teori yang digunakan dan konteks lokasi. Penelitian oleh Adhisti (2024) mengenai pengelolaan Desa Wisata Ranupani di Kabupaten Lumajang juga menemukan bahwa strategi pemerintah daerah memanfaatkan peluang dengan mengembangkan potensi lokal. Hambatan utama seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya dukungan kebijakan juga ditemukan dalam penelitian ini, yang menunjukkan kesamaan substansial dalam tantangan pengelolaan wisata. Adapun perbedaan terletak pada teori yang digunakan, yaitu SWOT dalam penelitian Adhisti, sementara penelitian ini menggunakan teori manajemen POAC oleh George Terry. Penelitian oleh Djaga (2023) di Kampung Adat Prai Ijing, Kabupaten Sumba Barat, memperkuat temuan bahwa pengembangan wisata berbasis budaya memerlukan penguatan SDM, peningkatan promosi, dan pengelolaan sarana prasarana yang berkelanjutan. Penelitian ini dan penelitian Djaga sama-sama menunjukkan pentingnya strategi yang memanfaatkan kekuatan lokal untuk menarik wisatawan, walaupun pendekatannya berbeda. Selanjutnya, penelitian oleh Mumtia (2020) mengenai Pantai Pasir Putih Lamreh di Aceh juga mengidentifikasi kurangnya promosi dan tidak memadainya fasilitas sebagai kendala utama dalam menarik pengunjung. Hal ini selaras dengan kondisi di Sumba Tengah yang mengalami keterbatasan promosi digital dan sarana prasarana. Keduanya juga menggunakan teori manajemen Terry sebagai pisau analisis. Penelitian oleh Hasanah (2017) mengenai pengelolaan wisata Rammang-Rammang yang dikelola masyarakat menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian dan mengelola objek wisata. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Sumba Tengah yang mulai melibatkan masyarakat adat dalam pelatihan dan pengelolaan wisata, meskipun masih perlu ditingkatkan secara partisipatif. Sementara itu, penelitian oleh Azim (2020) di Pekanbaru menunjukkan bahwa pengelolaan wisata yang tidak efektif berakar pada kondisi sarana dan prasarana yang rusak dan kurang terpelihara. Penelitian ini menunjukkan kemiripan karena di Sumba Tengah juga ditemukan bahwa fasilitas wisata seperti akses jalan, toilet umum, dan pusat informasi masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menguatkan temuan-temuan sebelumnya bahwa manajemen pariwisata oleh pemerintah daerah di daerah-daerah berkembang masih menghadapi tantangan besar, baik dari aspek perencanaan, pelibatan masyarakat, promosi, hingga sarana prasarana. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen pemerintahan secara sistematis dapat menjadi kerangka kerja yang efektif dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan solusi strategis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dan memperkaya khazanah keilmuan yang telah dikembangkan dalam penelitian-penelitian terdahulu, khususnya dalam konteks pengelolaan wisata budaya berbasis kampung adat di daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai manajemen pemerintahan dalam pengelolaan wisata kampung adat di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa

Tenggara Timur, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen Pemerintahan dalam pengelolaan wisata kampung adat di Kabupaten Sumba Tengah oleh pemerintah daerah telah dilaksanakan melalui fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, penerapannya belum berjalan optimal secara menyeluruh. Perencanaan belum bersifat spesifik terhadap kampung adat, pengorganisasian belum didukung oleh struktur teknis yang memadai, pelaksanaan program belum merata menjangkau seluruh kampung adat, dan fungsi pengawasan belum dilengkapi dengan sistem evaluasi yang terukur dan partisipatif.
2. Faktor pendukung dalam pengelolaan ini meliputi komitmen pemerintah daerah, keberadaan nilai budaya Marapu yang masih terjaga, serta keterlibatan masyarakat, terutama pemuda. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas amenities, rendahnya kapasitas SDM di bidang teknologi informasi, serta belum meratanya pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan lokal seperti Pokdarwis.
3. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang ada, baik secara langsung melalui pembangunan infrastruktur, pelatihan masyarakat, dan penyediaan fasilitas publik, maupun secara tidak langsung melalui kerja sama lintas sektor, mendorong promosi digital, serta menyusun dokumen perencanaan strategis seperti RIPPDA dan PPKD. Upaya-upaya ini menjadi langkah awal menuju pengelolaan wisata kampung adat yang lebih inklusif, profesional, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian:

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari agar menjadi pertimbangan dalam kajian lanjutan. Pertama, cakupan wilayah penelitian hanya difokuskan pada dua kampung adat, yaitu Kampung Adat Pasunga dan Kampung Adat Derikambajawa. Padahal, Kabupaten Sumba Tengah memiliki lebih dari sembilan kampung adat yang juga memiliki potensi wisata budaya yang belum sepenuhnya tergali. Pemilihan dua lokasi ini didasarkan pada tingkat kunjungan dan eksistensinya yang lebih menonjol dibandingkan kampung adat lainnya.

Kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian berdampak pada keterbatasan jumlah informan yang diwawancarai. Peneliti hanya melibatkan aktor-aktor dari pemerintah daerah, pengelola wisata, dan sebagian masyarakat, sehingga belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan seperti pelaku usaha lokal, media promosi, maupun komunitas budaya yang turut berperan dalam pengelolaan wisata.

Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga hasil yang diperoleh bersifat naratif dan tidak mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas masing-masing fungsi manajemen. Hal ini menyebabkan penilaian terhadap keberhasilan program bersifat relatif dan bergantung pada persepsi informan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penelitian ini, khususnya kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Tengah kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta memberikan informasi dalam proses penelitian ini..

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adhisti, D. (2024). *Strategi Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Desa Wisata Ranupani di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur*.
- Aswar Darwis, M., Elviani, A., & Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buama, S. (2024). Manajemen Pengelolaan Pariwisata Air Terjun Bantimurung Kabupaten Maros. *YUME: Journal of Management*, 7(1).
- Azim, A. (2020). *Analisis Pengelolaan Objek Wisata Danau Bandar Khayangan oleh Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru (Studi pada seksi sarana dan prasarana)*.
- Basyar, M. R., Mardiyanta, A., & Setijaningrum, E. (2025). Multi-stakeholder analysis in building tourism resilience: Collaborative governance implementation in the Majapahit House

- Heritage Area, Indonesia. *Tourism and Hospitality*, 6(1).
<https://doi.org/10.3390/tourhosp6010005>
- Djaga, K. R. (2023). *Strategi Pengembang Objek Wisata Kampung Adat Prai Ijing dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur*. Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta.
- Hasanah, M. (2017). *Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis Masyarakat (Kasus Objek Wisata Alam Rammang-Rammang Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan)*.
- Indrajaya, S. (2024). *Manajemen Pariwisata*. Kaizen Media Publishing.
- Ismayanti. (2020). Dasar-dasar pariwisata. *Jurnal Dinamika Pendidikan*.
- Kusuma, Y. A. (2024). Manajemen pengelolaan wisata Pahlawan Center melalui analisis potensi dan manajemen strategi. *Altasia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2).
<https://doi.org/10.37253/altasia.v6i2.9114>
- Manulang, M. (2006). *Dasar-dasar manajemen* (16th ed.). Gadjah Mada University Press.
- Mumtia, N. (2020). *Konsep Manajemen Pariwisata dalam Meningkatkan Pengunjung di Pantai Pasir Putih Lamreh*.
- Noviana, L., Situmorang, M. T. N., Cahyaputri, B., Farida, F., & Sukwika, T. (2025). Analysis of Pentahelix Tourism Village for Ecotourism Development in Batu City, East Java. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(3), 1273–1282.
<https://doi.org/10.18280/ijstdp.200332>
- Saputra, R. (2017). *Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Kampung Tematik di Kota Bogor* [Skripsi]. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/417/>
- Sartika, I., & Wargadinata, E. L. (2020). *Analisis Faktor Keberhasilan Pariwisata Berbasis Masyarakat Perdesaan Di Indonesia*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/417>
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintahan Daerah*. Wahana Resolusi.
- Sholeha, A. W., & Sumarmi, S. (2025). Managing sustainable tourism of Perawan Beach, East Java, Indonesia based on the Coastal Ecosystem Service (CES) approach. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 58(1), 78–88. <https://doi.org/10.30892/gtg.58107-1392>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Dasar-dasar Manajemen* (2nd ed.). CV. Mandar Maju.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-dasar Pariwisata*. Andi.
- Terry, G. R. (2009). *Prinsip-prinsip Manajemen* (J. Smith D.F.M., Trans.). Guide to Management.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2014). *Dasar-dasar Manajemen* (2nd ed.). Bumi Aksara.
- Tresiana, N., & Kartika, T. (2024). Developing a model for sustainable traditional tourism village. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(6), 2135–2145.
<https://doi.org/10.18280/ijstdp.190613>
- Wasiatono, S., & Simangunsong, F. (2020). *Teori Pemerintahan Daerah* (1st ed., Vol. 27). Universitas Terbuka.
- Widana, I. B. G. A., Mudamakin, A. P., & Subrata, I. M. (2022). Prioritas pengembangan DTW bahari di kawasan pesisir utara Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kepariwisata*, 21(2), 177–186. <https://doi.org/10.52352/jpar.v21i2.864>
- Widiastini, N. M. A., Arsa, I. K. S., Prayudi, M. A., & Agustini Karta, N. L. P. (2025). Strategic collaborations and diversification pathways to sustainable growth in Bali's tourism village and business ecosystems. *Jurnal Kajian Bali*, 15(1), 146–172.
<https://doi.org/10.24843/JKB.2025.v15.i01.p06>
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien* (1st ed.). Perdana Mulya Sarana.
- Zein, H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalisasi untuk Integrasi dan Optimalisasi Good Government*. PT. Sada Pustaka.